



# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157 759

## PENGUMUMAN

Nomor : 3/SDM.03.1-Pu/05/SJ/III/2020

## TENTANG

### BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BATCH VI TAHUN 2020

Komisi Pemilihan Umum dalam Tahun Anggaran 2020 ini kembali membuka kesempatan bagi 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk memperoleh Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Cenderawasih.

Pelaksanaan kegiatan beasiswa tersebut telah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Ketentuan pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:

## PERSYARATAN:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun bagi pelamar beasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) pada bulan September di tahun penerimaan beasiswa (daftar terlampir);
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a), dengan ketentuan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
4. memiliki surat rekomendasi dari atasan langsung secara berjenjang, yaitu : Sekretariat Jenderal KPU RI oleh Kepala Biro atau Inspektur (tembusan Deputi atau Inspektur Utama), Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (tembusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh);
5. berpendidikan sarjana (S-1), bagi yang telah menyelesaikan pendidikan maupun yang sedang melaksanakan pendidikan Magister (S-2) tidak diperkenankan untuk melamar;
6. memahami dan menguasai tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki kemampuan pengembangan kompetensi lebih lanjut;
7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional tertentu bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional tertentu, dengan ketentuan:
  - a) pada Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
  - b) pada Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor, Dokter, dan lain-lain) dibebaskan sementara dari jabatannya.

TAHAPAN SELEKSI :

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman melalui laman KPU (www.kpu.go.id)	17 Maret s.d 11 Juni 2020
2	Pendaftaran melalui surel ke <a href="mailto:diklat.birosdm@kpu.go.id">diklat.birosdm@kpu.go.id</a>	
3	Penelitian Administrasi	17 Maret s.d 14 Juni 2020
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi	17 Juni 2020
5	Seleksi wawancara	18 s.d 29 Juni 2020 *
6	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di universitas**	Sesuai jadwal seleksi di masing- masing universitas, termasuk jadwal seleksi yang dikeluarkan sebelum tahapan seleksi beasiswa
7	Pengumuman penerima beasiswa	Bulan Juli s.d Agustus 2020
8	Perkuliahhan	Sesuai jadwal perkuliahan semester gasal di masing-masing universitas

- \*) Jadwal seleksi wawancara sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diinformasikan kepada para pelamar beasiswa.
- \*\*\*) pelamar beasiswa wajib mendaftar di universitas dan mengikuti ketentuan tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing universitas. Biaya pendaftaran dan biaya perjalanan mengikuti seleksi beasiswa ditanggung oleh pelamar beasiswa.

PENDAFTARAN KE KPU:

Pelamar beasiswa melakukan pendaftaran secara *online* melalui surat elektronik ke alamat [diklat.birosdm@kpu.go.id](mailto:diklat.birosdm@kpu.go.id) dengan melengkapi *softcopy* hasil pindai dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. surat lamaran permohonan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh pelamar beasiswa;

2. surat rekomendasi dari atasan langsung secara berjenjang, yaitu : Sekretariat Jenderal KPU RI oleh Kepala Biro atau Inspektur (tembusan Deputi atau Inspektur Utama), Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
4. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. fotokopi ijazah sarjana yang dilegalisir;
6. fotokopi transkrip nilai sarjana dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh pelamar beasiswa;
8. bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional tertentu, dengan ketentuan:
  - a. pada Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
  - b. pada Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor, Dokter, dan lain-lain) dibebaskan sementara dari jabatannya.
9. surat pernyataan bersedia ditempatkan di Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu di luar pilihan pelamar beasiswa;
10. surat pernyataan bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa Tugas Belajar yang berlaku;
11. tanda bukti pendaftaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu (dapat disusulkan jika pada saat pelamar beasiswa mengirimkan dokumen persyaratan namun masa pendaftaran pendaftaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru belum dibuka);
12. proposal rencana tesis yang akan diambil terkait dengan kepemiluan dan bisa dijadikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada KPU atau berupa inovasi terhadap pelaksanaan tugas KPU; dan
13. esai mengenai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) kata untuk masing-masing poin berikut:

- a. motivasi dan komitmen pribadi untuk ikut serta dalam beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
- b. pencapaian terbesar dalam bekerja; dan
- c. kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

Seluruh tahapan seleksi beasiswa akan diumumkan melalui laman KPU: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

#### KOMPONEN BEASISWA:

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	SPP 4 (empat) semester	sesuai besaran SPP yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor di masing-masing Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu
2	Biaya hidup dan biaya operasional	sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan
3	Uang buku dan referensi	
4	Transportasi 1 kali menuju universitas dan 1 kali kembali ke satuan kerja ***	
5	Bantuan biaya riset	Diberikan pada semester ketiga
6	Bantuan biaya studi literatur atau <i>visiting study</i> dalam menempuh matakuliah wajib <i>benchmarking</i>	1 (satu) tahun sebelumnya mengajukan proposal kepada KPU
7	Biaya wisuda dan/atau yudisium dan/atau toga	Sesuai besaran yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor di masing-masing Universitas

\*\*\*) Biaya transportasi 1 kali menuju universitas dan 1 kali kembali ke satuan kerja dapat diberikan sesuai *at cost* jika tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar para PNS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat menggunakan kesempatan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :

Bagian Diklat - Biro Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 2

Jl. Hayam Wuruk No. 108 - Jakarta Pusat

Telp. : (021) 22680210

Email : diklat.birosdm@kpu.go.id

CP : Sdr. Wilis (0813-8431-3615).

Jakarta, 16 Maret 2020

Plt. Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



*Nanang Priyatna*

Nanang Priyatna

Lampiran

Pengumuman Plt. Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 3/SDM.03.1-Pu/05/SJ/III/2020

Tanggal : 16 Maret 2020

#### DAFTAR DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (PERBATASAN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015, berikut terlampir daftar daerah tertinggal, terdepan dan terluar (perbatasan) yang menjadi acuan pendaftaran beasiswa:

##### 1. Daftar Daerah Tertinggal

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
1	Aceh	1	Aceh Singkil
2	Sumatera Utara	1	Nias
		2	Nias Selatan
		3	Nias Utara
		4	Nias Barat
3	Sumatera Barat	1	Kepulauan Mentawai
		2	Solok Selatan
		3	Pasaman Barat
4	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas
		2	Musi Rawas Utara

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
5	Bengkulu	1	Seluma
6	Lampung	1	Lampung Barat
		2	Pesisir Barat
7	Jawa Timur	1	Bondowoso
		2	Situbondo
		3	Bangkalan
		4	Sampang
8	Banten	1	Pandeglang
		2	Lebak
9	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Barat
		2	Lombok Tengah
		3	Lombok Timur
		4	Sumbawa
		5	Dompu
		6	Bima
		7	Sumbawa Barat
		8	Lombok Utara
10	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Barat
		2	Sumba Timur
		3	Kupang
		4	Timor Tengah Selatan
		5	Timor Tengah Utara

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
10	Nusa Tenggara Timur	6	Belu
		7	Alor
		8	Lembata
		9	Ende
		10	Manggarai
		11	Rote Ndao
		12	Manggarai Barat
		13	Sumba Tengah
		14	Sumba Barat Daya
		15	Nagekeo
		16	Manggarai Timur
		17	Sabu Raijua
		18	Malaka
11	Kalimantan Barat	1	Sambas
		2	Bengkayang
		3	Landak
		4	Ketapang
		5	Sintang
		6	Kapuas Hulu
		7	Melawi
		8	Kayong Utara
12	Kalimantan Tengah	1	Seruyan
13	Kelimantan Selatan	1	Hulu Sungai Utara

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
14	Kalimantan Timur	1	Mahakam Ulu
15	Kalimantan Utara	1	Nunukan
16	Sulawesi Tengah	1	Banggai Kepulauan
		2	Donggala
		3	Toli-Toli
		4	Buol
		5	Parigi Moutong
		6	Tojo Una-Una
		7	Sigi
		8	Banggai Laut
		9	Morowali Utara
17	Sulawesi Selatan	1	Jeneponto
18	Sulawesi Tenggara	1	Konawe
		2	Bombana
		3	Konawe Kepulauan
19	Gorontalo	1	Boalemo
		2	Pohuwato
		3	Gorontalo Utara
20	Sulawesi Barat	1	Polewali Mandar
		2	Mamuju Tengah
21	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
22	Maluku	2	Maluku Tengah
		3	Buru
		4	Kepulauan Aru
		5	Seram Bagian Barat
		6	Seram Bagian Timur
		7	Maluku Barat Daya
		8	Buru Selatan
23	Maluku Utara	1	Halmahera Barat
		2	Kepulauan Sula
		3	Halmahera Selatan
		4	Halmahera Timur
		5	Pulau Morotai
		6	Pulau Taliabu
24	Papua Barat	1	Teluk Wondama
		2	Teluk Bintuni
		3	Sorong Selatan
		4	Sorong
		5	Raja Ampat
		6	Tambrauw
		7	Maybrat
25	Papua	1	Merauke
		2	Jayawijaya

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
25	Papua	3	Nabire
		4	Kepulauan Yapen
		5	Biak Numfor
		6	Paniai
		7	Puncak Jaya
		8	Boven Digoel
		9	Mappi
		10	Asmat
		11	Yahukimo
		12	Pegunungan Bintang
		13	Tolikara
		14	Sarmi
		15	Keerom
		16	Waropen
		17	Supiori
		18	Mamberamo Raya
		19	Nduga
		20	Lanny Jaya
		21	Mamberamo Tengah
		22	Yalimo
23	Puncak		
24	Dogiyai		
25	Intan Jaya		
26	Deiyai		

2. Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
1	Aceh	1	Aceh Besar
		2	Kota Sabang
2	Riau	1	Rokan Hilir
		2	Kota Dumai
		3	Bengkalis
		4	Kepulauan Meranti
		5	Pelalawan
		6	Indragiri Hilir
3	Kepulauan Riau	1	Karimun
		2	Kota Batam
		3	Bintan
		4	Kepulauan Anambas
		5	Natuna
4	Sumatera Utara	1	Serdang Bedagai
5	Nusa Tenggara Timur	1	Kota Kupang
		2	Timor Tengah Utara
		3	Belu
		4	Alor
		5	Rote Ndao
		6	Sabu Raijua
		7	Malaka

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
6	Kalimantan Barat	1	Sambas
		2	Bengkayang
		3	Sintang
		4	Kapuas Hulu
		5	Sanggau
7	Kalimantan Utara	1	Nunukan
		2	Malinau
8	Kalimantan Timur	1	Mahakam Hulu
		2	Berau
9	Sulawesi Utara	1	Kepulauan Sangihe
		2	Kepulauan Talaud
10	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat
		2	Kepulauan Aru
		3	Maluku Barat Daya
11	Maluku Utara	1	Pulau Morotai
12	Papua	1	Keerom
		2	Pegunungan Bintang
		3	Supiori
		4	Kota Jayapura
		5	Merauke
		6	Boven Digoel

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
13	Papua Barat	1	Raja Ampat

Plt. Sekretaris Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Nanang Priyatna*

Nanang Priyatna

Sehubungan dengan hal tersebut, agar para PNS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat menggunakan kesempatan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :

Bagian Diklat - Biro Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 2

Jl. Hayam Wuruk No. 108 - Jakarta Pusat

Telp. : (021) 22680210

Email : diklat.birosdm@kpu.go.id

CP : Sdr. Wilis (0813-8431-3615).

Jakarta, 16 Maret 2020

Plt. Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



*Nanang Priyatna*

Nanang Priyatna